

# MENGUKUR OBJEKTIVITAS LIPUTAN MEDIA DENGAN RUMUS *COEFFICIENT OF IMBALANCE*

(Studi Kasus Hasil Penelitian Metode Analisis Isi Kuantitatif Pemberitaan  
Kampanye Pemilu 1999 di Harian Jawa Pos dan Republika  
Terhadap Partai Golkar dan PDI-P)

**Rochmad Effendy**

Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Merdeka Malang  
email:effendyrochmad@gmail.com

## **Abstract**

*General election which aims at selecting the best national leadership for the next five year office term is people's democracy party event which requires the nation attention. Mass media plays an important role to have the event successful by covering general election campaign, along with its rule and procedures, the political party program statements, the prospective candidate track record, and general election irregularities in independent, neutral and impartial manner. By doing so, media functions as voter education to enable them to choose the candidate rationally based on unbiased and balanced media coverage. In addition, media have to control and monitor general election procedures violation committed by each general election stakeholders. If it is the case, the general election will run freely and fairly. To achieve this, media should cover objectively by means separating his subjective opinion from the fact being covered. This type of media coverage, among other things, will undoubtedly bring about free and fair general election. The paper attempts to describe the relation between media and politics, as well as the objectivity of East-Java Province based Jawa Pos newspapers sand Muslim-oriented Republika daily during general election 1999 campaign period. Besides, it tries to measure their coverage objectivity employing the Coefficient of Imbalance formulae especially with regard to the parties namely the presumed pro status quo Golkar party and the reformist PDI-P party. The paper puts its emphasis on the discussing the objectivity method for media coverage using quantitative content analysis. The papers concludes by presenting an example of content analysis result using the formulae on the 1999 general election media coverage which found that each newspaper was biased to each the political party with Jawa Pos favored PDI-P and Republika supported Golkar.*

**Keyword** :*Objectivity, Content Analysis, Coefficient of Imbalance, Inferences, judgment.*

## **Abstrak**

Pemilihan Umum yang bertujuan untuk menyeleksi kelayakan calon wakil rakyat dan pemimpin nasional merupakan perhelatan yang banyak menyita perhatian masyarakat dalam sebuah negara demokratis. Liputan pers yang independen, netral, tidak berpihak tentang kegiatan pemilu terutama tentang identitas dan rekam jejak calon pemimpin mutlak diperlukan agar masyarakat dapat memilih secara cerdas calon pemimpin mereka. Pers yang mampu menjalankan fungsi pendidikan politik dan kontrol sosial pers dalam kegiatan pemilu, makanya, akan menjadi jaminan utama terhadap penyelenggaraan prosesi pemilu yang bebas, jujur dan adil. Untuk itu, pemberitaan pers yang objektif memainkan peran strategis untuk

mencapai tujuan tersebut. Artikel ini membahas objektivitas liputan pers pada pemilu 1999 yang merupakan kegiatan pesta demokrasi pertama kali yang demokratis pasca Orde Baru. Penekanan di sini, diberikan pada aspek metode mengkaji objektivitas liputan pers pada koran *Jawapos* dan *Republika* pada pemilu 1999. Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif analisis isi dengan menggunakan rumus Koefisien Keberpihakan menemukan adanya keberpihakan kedua koran kepada salah satu partai politik peserta pemilu yakni Golkar dan PDIP.

**Kata Kunci :** *Objektivitas, Analisis Isi, Coefisien Keberpihakan, Report, Inferences, Judgement*

## **Pendahuluan**

Kegiatan pemilihan umum merupakan perhelatan politik. Para peserta pemilu mulai dari seperti partai politik beserta calon yang diusung, penyelenggara pemilu, lembaga swadaya masyarakat pemantau, pemerintah sebagai fasilitator berlomba-lomba untuk menyampaikan pesan politik masing-masing kepada warga pemilih. Program-program politik, peraturan tentang penyelenggaraan pemilu, hasil pemantuan penyelenggaraan pemilu semuanya tidak memiliki daya guna politik, kalau tidak dilaporkan dan diberitakan media. Dalam negara demokrasi liberal seperti Indonesia, media telah menjadi aktor politik seperti halnya partai politik, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat kelompok penekan (Brian McNair : 1999; 73). Media di sini tidak hanya melaporkan peristiwa politik, tapi telah menyatu padu dengan lingkungan politik yang sedang berlangsung (McNair: 1999:73). Meski demikian, media tepat dibebani beberapa tugas dan fungsi untuk mengawal keberlangsungan dan terpeliharanya pemerintahan yang demokratis. Untuk media itu, media lanjut McNair (1999: 21-22) harus dapat melaksanakan lima fungsi. *Pertama*, memberikan informasi seputar peristiwa yang di terjadi. *Kedua*, mendidik warga tentang arti dan nilai penting sebuah 'fakta' yang meniscayakan wartawan untuk bekerja secara profesional lewat menempatkan objektivitas sebagai nilai utama dalam kegiatan jurnalistik mereka. *Ketiga*, menyediakan sebuah platform demi keberlangsungan diskursus politik dan pembentukan opini publik termasuk mengakomodasi pendapat dan gagasan yang berbeda. *Keempat*, fungsi pengawas dan anjing

penjaga (*watchdog*) dengan memberitakan dan mengawasi kegiatan pemerintah dan lembaga politik. *Kelima*, menjadi saluran advokasi bagi penyebarluasan gagasan-gagasan politik.

Berkaitan dengan hal tersebut, media yang independen yang merupakan perwujudan dari kebebasan pers adalah salah satu indikator sukses penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, liputan media yang objektif, netral, berimbang merupakan keniscayaan. Hal ini untuk memberikan informasi yang memadai tentang regulasi pemilu, partai politik peserta, program kerja beserta rekam jejak calon pemimpin kepada para pemilih. Fungsi pendidikan pemilih (*voters education*) ini merupakan konsekuensi pers yang harus menjalankan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik menjelang dan pada saat pemilu berlangsung. Di samping itu, pers juga harus berperan sebagai kontrol sosial yang mengawasi tindakan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu (Manuel Kaisiepo, 1999: 5-6). Mengingat pentingnya independensi pers dalam kegiatan pemilu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerjasama dengan dengan IRRI Pact memandang perlu untuk menyusun buku bertajuk "Bersikap Independen! Pedoman Meliput Pemilu di Masa Transisi Demokrasi".

## **Pembahasan**

Tulisan ini akan mendiskusikan tentang relasi pers dengan politik terutama kegiatan pemilihan umum, metode analisis isi kuantitatif dengan menggunakan rumus koefisien keberpihakan untuk menakar objektivitas pemberitaan pemilu 1999, serta paparan hasil penelitian objektivitas.

## Hubungan Pers Dengan Aktivitas Politik Dan Pemilu

Pers bukan hanya berfungsi sebagai pemberi informasi tapi juga *agenda setter*, sebagai penentu agenda bagi khalayak. Hal ini mengasumsikan adanya hubungan positif antara isi peliputan/pemberitaan media tentang topik tertentu/dengan perhatian yang diberikan khalayak terhadap persoalan tersebut. Singkat kata, apa yang dianggap penting oleh pers akan dianggap penting pula oleh khalayak. Demikian pula apa yang dianggap tidak penting akan dianggap tidak penting pula oleh khalayak (Jalaluddin Rahmat, 1989:92). Akan tetapi informasi yang terkemas dalam surat kabar baik yang berupa tulisan berita, photo dan gambar kartun tidak tersaji dalam ruangan hampa. Jelas ada maksud dan tujuan baik tersirat maupun yang tersurat dibalik hal tersebut. Ada praktek seleksi dan interpretasi dalam proses produksi teks ; memilih kelayakan berita dan pemuatannya di surat kabar, mendefinisikan dan memilih realitas sosial empiris, mengkonstruksi realitas politik sosial tertentu.

Sejarah pers nasional dipenuhi dengan kompetisi sengit memperebutkan wacana politik antar kekuatan dominan. Sebagai aktor politik, pers menjadi kekuatan strategis untuk dijadikan sebagai wahana perjuangan mengembangkan wacana menggugat keabsahan penjajah meski dengan resiko pahit berwujud pembredelan dan pemerjaraan para pengelola pers saat pemerintahan kolonial. Era kebebasan pers sebagai konsekuensi dari penerapan demokrasi liberal tahun 1955-1959 bukan membuat kinerja pers yang profesional, tapi malah justru melahirkan pers partisan bahkan menjadi corong politik partai politik tertentu. Era kebebasan pers berakhir total pada era Orde Baru yang mengawasi secara ketat perilaku pers yang tidak menyisakan sedikitpun ruang untuk menyuarakan wacana di luar wacana yang telah didiktekan penguasa. Bahkan rezim orde baru telah mengembangkan permainan bahasa (*language*

*game*) dengan memperkenalkan kosakata, frase dan kalimat tertentu yang disampaikan secara berulang-ulang, formal dan eufimistik (Ibnu Hamad: 2004: 76-78).

Pengaruh pers terhadap perubahan perilaku pemilih tidak signifikan dan hanya cenderung memperkuat pilihan terhadap parpol tertentu (*reinforcement effect*). Pemilih dari kalangan Muhammadiyah yang secara emosional dan struktural telah berafiliasi dengan dengan Partai Amanat Nasional (PAN), jelas tidak akan mempan dengan liputan atau iklan politik dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan parpolnya warga Nahdhiyyin. Liputan pers tentang parpol hanya akan efektif untuk mempengaruhi pihak yang belum menentukan pilihan politik (*swinging voters*). Meski demikian, aktivitas kampanye bagi partai politik tetap perlu dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan. *Pertama*, ada upaya untuk membangkitkan loyalitas para pengikut partai dan agar mereka memilih partai tersebut. *Kedua*, ada kegiatan untuk menjajaki warga negara yang tidak terikat pada partai atau menciptakan identifikasi pada golongan independen. *Ketiga*, ada usaha kampanye yang ditujukan kepada kaum oposisi, bukan dirancang mengalihkan kepercayaan dan nilai anggota partai, melainkan untuk rakyat bahwa keadaan akan lebih baik jika dalam kampanye ini mereka memilih kandidat dari partai lain (Dan Nimmo, 1993:192).

Berkaitan dengan hal tersebut, pers yang merupakan pilar keempat demokrasi seharusnya memainkan peran strategis dalam proses pendewasaan politik warga masyarakat. Untuk itu, makanya pers dituntut untuk selalu memegang teguh Kode Etik Jurnalistik yang mewajibkan wartawan untuk selalu menyajikan produk berita yang objektif, berimbang, netral dan memihak kepada kebenaran serta memperjuangkan kepentingan rakyat. Pers nasional, menurut pasal 6 UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers memainkan peranan untuk: (b) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM serta menghormati

kebhinekaan. (c) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. (d) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. (e) memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Untuk itu, dalam rangka melaksanakan kegiatan jurnalistiknya, para wartawan menurut Bill Kovach (2004:6) memiliki kewajiban utama yakni menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri mereka. Agar tugas mulia ini bisa dilakukan wartawan, Bill Kovach menyarankan sembilan hal yang mesti dipegang teguh dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik mereka. Sembilan hal tersebut adalah: (1) Kewajiban pertama jurnalis adalah pada kebenaran. (2) Loyalitas pertama jurnalis adalah memenuhi hak mengetahui warga. (3) Intisari jurnalis adalah disiplin dalam verifikasi. (4) Para wartawan harus menjaga independensi terhadap sumber berita. (5) Jurnalis harus berfungsi sebagai pemantau kekuasaan. (6) Jurnalis harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga. (7) Jurnalis harus berupaya membuat hal-hal penting menarik dan relevan. (8) Jurnalis harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional. (9) Para praktiknya harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka. Objektivitas, keberimbangan dan netralitas pemberitaan pers merupakan hal yang mutlak tersaji dalam liputan pers nasional pada masa pemilu. Pemberitaan yang nihil kepentingan-kepentingan politik para pengelola pers, dan elit penguasa diharapkan mampu mendidik para calon pemilih untuk membuat pilihan politis yang rasional. Dengan demikian, berita yang bersih dari sisipan kepentingan sempit politik ini diharapkan mampu melaksanakan proses pembelajaran proses demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

## **Kajian tentang liputan pers dan Pemilu**

Penelitian tentang kampanye Pemilu 1992 dengan mengkaji editorial surat kabar *Suara Merdeka* (SM) melalui metode semiotika menemukan bahwa koran SM cenderung memihak Golkar. Tapi penelitian tersebut tidak mempelajari lebih dalam alasan mengapa keberpihakan ini terjadi (Y. Krisnawan: 1997). Pada penelitian yang lain yang dilaksanakan pada Pemilu 1977 tapi berbeda dalam obyek kajian mendapatkan hasil temuan yang berbeda. Mustofa Kamil dengan menganalisa isi 5 surat kabar nasional terbitan Jakarta (*Kompas*, *Merdeka*, *Sinar Harapan*, *Suara Karaya* dan *Pelita*) menemukan bahwa sebagian besar berita-berita liputan tentang kampanye Pemilu 1997 cenderung bersikap netral. Meski demikian, terdapat juga kecenderungan partisan kepada parpol tertentu dalam peliputan. Ini terutama pada koran yang berafiliasi dengan parpol tertentu, seperti pada koran *Suara Karya* yang memihak kepada Golkar dan surat kabar *Pelita* kepada PPP. Akibat sikap partisan ini, peliputan tentang PDI sangat minim dalam kedua koran tersebut (Don Michael F, 1989: 177). Tambahan, penelitian pemberitaan Pemilu 1987 pada surat kabar *Kompas*, *Suara Pembaharuan*, *Suara Karya*, *Merdeka*, *Prioritas*, *Pikiran Rakyat*, *Kedaulatan Rakyat*, *Suara Merdeka*, *Jawa Pos*, dan *Bali Pos* menemukan hubungan paternalistik antara pers dengan elit penguasa. Relasi patron-client antara pers dengan elit penguasa saat itu. Pers saat itu telah dijinakkan (domestikasi) oleh penguasa dalam sebuah hubungan yang saling menguntungkan (symbiosis mutualistik). Tidak heran, kalau gaya liputan pemilu lebih kental aroma sloganistik yang lebih menonjolkan aspek hiburannya daripada materi dan substansi pemilu. Berada dalam cengkeram kekuasaan otoriter orde baru, membuat pers saat itu harus berhati-hati dalam mengungkapkan isu-isu kontroversial (Harsono Suwardi. 1993: 19-20)

Oleh karenanya, penelitian yang mengkaji objektivitas peliputan pers tentang kampanye Pemilu parpol terasa mendesak dilakukan dengan beberapa alasan. Pertama, untuk mengetahui sikap pers nasional dalam meliput aktivitas parpol dalam kampanye Pemilu. Dengan kata lain, dalam kondisi kebebasan pers yang sedang menggejala seperti sekarang ini, diperlukan pers yang tetap memiliki komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kalau tidak, pers justru akan terjerembab dalam kubangan kepentingan sempitnya sendiri. Ini mengingatkan pers masa kini adalah juga merupakan institusi bisnis di samping sebagai lembaga sosial dari politik. Kedua, menjelaskan apakah mampu melaksanakan tugas peliputan Pemilu dengan tetap selalu memegang teguh nilai-nilai yang tersebut di atas.

### **Konsep Objektivitas Berita**

Konsep obyektivitas dalam peliputan adalah masalah *subtle* dan bahkan hampir hanya sebatas mitos. *Term* ini baru dipakai dalam wacana jurnalisme pada tahun 1920-an. Sebelumnya, istilah yang selalu digunakan dalam diskursus jurnalisme adalah kata *unbiased* (tidak memihak, tidak bias) dan *uncolored* (tidak diwarnai oleh opini pribadi, benar berdasarkan fakta nyata di lapangan). Istilah-istilah ini menurut pengertian aslinya berarti menemukan kebenaran melalui usaha sungguh-sungguh sebagai mana layaknya ilmuwan berusaha mencari menemukan kebenaran (*finding the truth though rigorous methodology of scientist*) (Richard Strekfuss, 1990: 975). Tidak heran, kalau hal sempat ini mengundang perdebatan alot antara kubu pro objektivitas dan pihak yang anti objektivitas. John C. Merrill seperti dikutip Eriyanto (2000: 87) menyatakan bahwa objektivitas jurnalistik itu mustahil terwujud karena semua aktivitas jurnalistik pada dasarnya adalah subjektif. Ini, lanjutnya, bisa dilihat dari mulai mulai pencarian berita, peliputan, penulisan sampai editing yang kesemuanya adalah melibatkan subjektivitas wartawan; kenapa suatu peristiwa diliput, siapa yang diwawancarai, apa yang ditanyakan, kemana

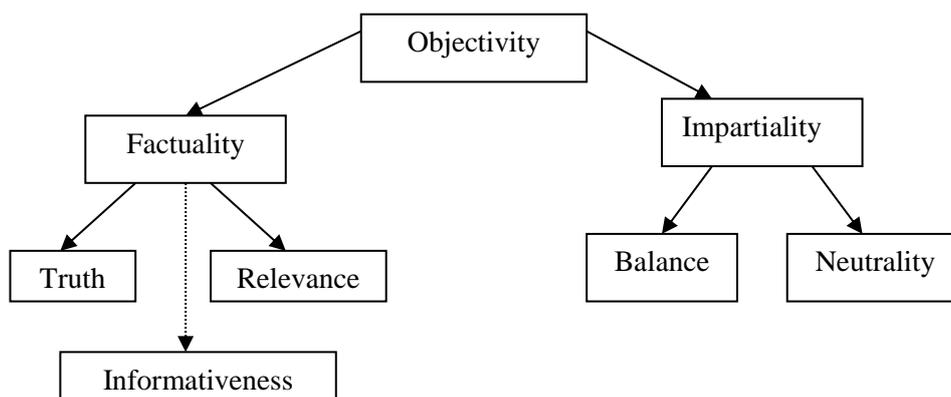
kecenderungan berita ditulis, kenapa mengambil sudut pandang berita tertentu, bagian mana yang dihapus dan ditonjolkan. Sebaliknya, Everette E. Dennis memandang objektivitas jurnalistik sangat dimungkinkan dan bukan sesuatu yang mustahil. Ini, lanjutnya, karena semua kegiatan jurnalistik pada dasarnya dapat diukur dengan nilai-nilai objektif. Ini bisa dilihat dari beberapa prinsip seperti: memisahkan fakta dari opini, menghindari pandangan emosional dalam memandang peristiwa, memberikan prinsip keseimbangan dan keadilan serta melihat peristiwa dari dua perspektif. Dennis percaya, objektivitas dapat diterapkan apabila mengadopsi metoda dan prosedur yang dapat membatasi subjektivitas wartawan atau editor. Prosedur ini diterapkan baik pada tingkat peristiwa yang akan diliput (apa pertimbangan objektif dan rasional mengapa suatu peristiwa diliput), mencari data (dari mana saja data diambil), sampai menulis (kata apa yang dipakai), editing tulisan (apa alasan menempatkan berita menjadi *headline*), dan lain sebagainya (Eriyanto: 2000: 87).

Meski konsep objektivitas mengundang perdebatan, tapi Hayakawa (1946) seperti dikutip Severin dan Tankard (1992: 82-83) memberikan jalan keluar dari perdebatan ini dengan cara selalu berusaha meliput warta dalam *report* yang memungkinkan dilakukannya validasi dan verifikasi terhadap objek berita serta menghindari sejauh mungkin *inference* (kesimpulan), *judgement* (penilaian), dan *slanting* (memilih dan memilah bahan yang sesuai atau tidak sesuai dengan materi yang sedang dideskripsikan). Yang dimaksud dengan *Report* adalah kalimat yang mengandung fakta keras yang bisa diverifikasi dan disangkal oleh pihak lain. *Inferences* adalah kalimat yang mengandung sebuah pernyataan tentang sesuatu yang belum diketahui dan dibuat dibuat berdasarkan pada sesuatu yang telah diketahui. Dengan kata lain, kalimat yang berusaha menyimpulkan sesuatu yang belum terverifikasi serta hanya berlandaskan dari sesuatu yang diketahui sebelumnya. Sementara *judgements* adalah kalimat yang mengandung

ungkapan suka atau tidak suka oleh sang penulis terhadap kejadian, orang atau obyek tertentu yang sedang penulis jelaskan. Petunjuk praktis di sini adalah sebuah kalimat yang terdiri kata sifat dan adverb atau kata yang kuat atau yang secara jelas menggambarkan perasaan penulis terhadap obyek sikap tertentu

Objektivitas menurut Dennis McQuail (2000:172) adalah mengambil posisi terpisah dan netral dengan menanggalkan subjektivitas dan pendapat pribadi wartawan terhadap objek pemberitaan atau sumber berita. Ini juga berarti memegang teguh secara ketat prinsip akurasi dan kriteria kebenaran seperti relevansi dan kelengkapan data. Ini sekaligus berarti nihilnya maksud tersembunyi untuk mengutamakan melayani pihak ketiga. Untuk menjelaskan konsep ini, Wasterstahl (dalam Dennis McQuail: 2000: 173-4) menyatakan bahwa objektivitas meliputi dua konsep utama yakni: (1) *impartiality* (sikap nonpartisan) yang mencakup aspek *balance* (keberimbangan) dan *neutrality* (sikap netral). (2) Faktualitas yang mencakup *truth* (kebenaran), *relevance* (relevansi) dan *informativeness* (lihat tabel dibawah). Menurutnya, objektivitas berkaitan dengan nilai dan fakta yang memiliki implikasi evaluatif. Faktualitas berarti sebuah bentuk reportase tentang peristiwa dan pernyataan yang bisa diverifikasi terhadap sumber berita dan disajikan bebas dari opini subjektif wartawan atau paling tidak terpisah dari komentar subjektif. Ini juga meliputi kelengkapan data, akurasi data dan wujudnya niat untuk tidak menyembunyikan apa yang penting. Relevansi lebih berkaitan dengan

proses pemilihan daripada dengan bentuk penyajian. Hal ini makanya, mempersyaratkan bahwa proses seleksi tersebut berlangsung secara jelas dan berkesinambungan tentang apa yang penting untuk khalayak/masyarakat. Singkat kata, apa berkaitan secara langsung terhadap masyarakat adalah yang paling relevan. Dalam memberitakan kasus perkosaan misalnya, wartawan harus menyajikan fakta kasus tersebut dengan menggunakan rumus 5H 1H apa adanya dan tidak terjebak pada eksploitasi pornografi dengan mengulas secara detil bagaimana proses bagaimana pemerksaan itu terjadi. Ini karena hal ini tidak relevan, tidak memiliki kepentingan apapun terhadap masyarakat. Adapun *impartiality* mengasumsikan sebuah sikap netral yang harus diwujudkan dengan menerapkan prinsip keberimbangan (keberimbangan waktu/ruang/penekanan) dalam memperlakukan penafsiran, pandangan yang bertentangan serta menyajikan hal tersebut secara tidak berpihak. Singkat kata, informasi yang tersaji dalam pers harus objektif dalam arti akurat, jujur, cukup lengkap, sesuai dengan realitas, terpercaya dan terpisah dari gagasan subjektif. Disamping itu, informasi harus tersaji secara berimbang dan adil serta memaparkan pendapat-pendapat alternatif dengan cara yang tidak bias dan tidak sensasional (Dennis. McQuail: 2000: 173-4). *Information should be objective in the sense of being accurate, honest, sufficiently complete, true to reality, reliable, and separating fact from opinion. Information should be balanced and fair (impartial), reporting alternative perspectives in a non-sensational, unbiased way.*



Berkaitan dengan objektivitas (faktualitas dan imparialitas) tersebut di atas, Siti Hanifa (2014: 7) mengemukakan sembilan tolok ukur pemberitaan yang objektif. Hal ini seperti faktualitas, akurasi, kelengkapan, *relative salience*, *relative priority*, proporsional, *cover both side*, non evaluatif, dan non sensasional. Sementara itu, Henri Subiakto dkk (2000) mengulas konsep tersebut secara operasional. *Pertama*, Aspek faktualitas meliputi akurasi pemberitaan yang menekankan pada kejujuran dalam pemberitaan. Ini berkaitan dengan hal-hal seperti : (a) kesesuaian judul berita dengan isi berita; (b) kelengkapan data yang disajikan seperti dalam rumus penyusunan berita 5 WH; (c) Penggunaan data pendukung atau kelengkapan informasi atas kejadian yang ditampilkan; (d) ada tidaknya pencampuran fakta dengan opini wartawan yang menulis berita yang tercermin dari penggunaan kata-kata opinionative seperti tampaknya, diperkirakan, seakan-akan, terkesan, kesannya, seolah, agaknya, diperkirakan, diramalkan, kontroversi, mengejutkan, manuver, sayangnya, dan kata-kata opinionatif lainnya. *Kedua*, aspek imparialitas atau *fairness* mencakup keseimbangan penulisan berita. Ini dapat diukur dari : (a) Keseimbangan dalam memberikan porsi yang sama pada masing-masing pihak yang diberitakan baik dilihat dari kedudukan mereka sebagai sumber berita, maupun dari jumlah sumber beritanya; (b) Kesamaan perlakuan dalam memberikan proporsi ruang luas kolom (centimeter kolom), dan waktu. Henri Subiakto (2000) lantas menambah satu point objektivitas pemberitaan yakni validitas keabsahan pemberitaan. Ini meliputi dua hal yakni atribusi dan kompetensi nara sumber yang dirujuk dalam pemberitaan. Aspek atribusi mencakup pencantuman sumber berita secara jelas (baik identitas maupun dalam upaya konfirmasi atau cek dan ri-cek). Sedangkan aspek kompetensi sumber berita berkaitan dengan hasil liputan. Berita yang dihasilkan merupakan karya pengamatan langsung wartawan, atau dari sumber berita yang menguasai persoalan, atau hanya

sekadar kedekatannya dengan media yang bersangkutan atau karena jabatannya.

Ada kriteria lain yang ditawarkan oleh John Merrill (1965) dalam Severin dan Tankard (1992: 84) untuk mengukur sejauh mana bias sebuah warta dengan menggunakan konsep semantik bahasa. Dalam studinya "*How Time Stereotype Theree U.S Presidents*," Merrill mengelompokkan enam jenis bias dalam pemberitaan: *Attribution bias*, *adjective bias*, *adverbial bias*, *outright opinion*, *contextual bias*, *photogrphic bias*, *adjective bias*, *adverbial bias*, *outright opinion*, *contextual bias*, *photographic bias*. Hasil studinya menemukan bahwa ditemukan bias negatif yang kuat terhadap Truman, bias positif yang kuat terhadap Eisenhower dan peliputan yang berimbang terhadap Kennedy.

Singkat kata, objektivitas berita menganut pandangan kaum positivis (Eriyanto: 2002: 20-35). Pandangan mereka lantas dipaparkan oleh Eriyanto dengan mempertentangkannya dengan pandangan para konstruksionis. Positivis melihat adanya fakta yang 'riil' yang diatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal. Media, makanya bertugas untuk menyalurkan pesanyang merupakan cerminan dan pantulan dari kenyataan. Sebab berita yang disampaikan harus sama dan sebangun dengan fakta yang hendak diliput. Nah agar objektif, berita harus faktual dengan menyingkirkan pandangan subjektif dari pembuat berita. Sebaliknya, konstruksionis memandang bahwa fakta merupakan konstruksi atas realitas. Kebenaran suatu fakta bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks tertentu. Media, makanya media merupakan agen konstruksi pesan. Ini karena berita tidak mungkin merupakan cermin dari realitas, karena berita yang terbentuk merupakan konstruksi atas realitas. Berita, makanya selalu bersifat subjektif, sebab saat meliput wartawan menggunakan pertimbangan subjektifnya. Konsekwensinya, adalah wartawan menurut positivis adalah pelapor atas peristiwa

yang diliput yang mewajibkannya untuk menyingkirkan nilai, etika, pilihan moral saat meliput peristiwa. Tidak demikian halnya dengan konstruksionis yang memandang bahwa wartawan sebagai partisipan yang bertugas menjembatani keragaman subjektivitas pelaku sosial. Nilai, etika atau keberpihakan wartawan, makanya tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan suatu peristiwa. Dengan kata lain, objektivitas menurut Fiske seperti dikutip Eriyanto (2011: 2-4) mengikuti aliran transmisi yang memandang bahwa komunikasi sebagai proses pengiriman pesan secara linear dari pengirim kepada penerima. Pesan bersifat statis berupa materi konkrit yang terlihat serta dapat dirasakan, didengar atau dibaca. Pesan tersebut, makanya hanya akan diketahui isinya kalau diukur dan dihitung dengan metode analisis isi kuantitatif. Hal ini jelas berbeda dengan aliran produksi dan pertukaran makna yang memandang bahwa komunikasi merupakan pertukaran makna yang bersifat dinamis yang merupakan produk konstruksi dan interaksi antara pengirim dan penerima. Karena makna tidak terlihat alias laten, maka isi atau substansinya dapat diungkap dengan menafsirkannya lewat metode analisis interpretif kualitatif seperti framing, semiotika dan wacana.

### **Mengukur Objektivitas dengan Rumus *Coefficient of Imbalance***

Agar dapat diketahui objektivitas pemberitaan, analisis isi kuantitatif dapat diterapkan untuk tujuan tersebut. Analisis isi menurut Klaus Krippendorff (1993:15) merupakan suatu teknik penelitian untuk membuat simpulan data yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah dengan memperhatikan konteksnya. Metode analisis isi pada dasarnya merupakan suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. Kerlinger (2000), analisis isi didefinisikan sebagai suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi

secara sistematis, obyektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak dengan tujuan untuk mengukur variabel. Analisis isi merupakan metode penelitian yang sistematis, objektif dan kuantitatif (Wimmer & Dominick 2003: 141). Eriyanto (2011: 15) mendefinisikannya sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Hal ini diarahkan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak (*manifest*), dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel, dan dapat direplikasi. Analisis isi, makanya metode penelitian yang objektif, sistematis, replikabel, manifest (*isi yang tampak*), serta melakukan perangkuman (*summarizing*) dan generalisasi.

Koefisien keberpihakan (*Coefficients of Imbalances*) merupakan rumus yang dikembangkan oleh Janis dan Fadner (1965). Rumus ini digunakan untuk mengukur derajat keberpihakan suatu surat kabar terhadap obyek penyikapan tertentu. Ini dapat diterapkan dengan cara menghitung keseluruhan isi komunikasi dan konten komunikasi yang relevan dengan objek penyikapan (*object attitude*) yang akan diteliti (Diana Peh dan Melkote. 1991: 67). Keberpihakan di sini berarti kadar rasio perbedaan antara informasi positif, negatif, berimbang/netral. Rumus koefisien ini adalah sebagai berikut:

1.  $C(f) = (f-u).f/r.t$ . Rumus digunakan jika jumlah kalimat positif lebih banyak daripada yang negatif.
2.  $C(u) = (f-u).u/r.t$ . Rumus ini digunakan ketika jumlah kalimat negatif melebihi jumlah kalimat positif.

Simbol  $C$  berarti koefisien keberpihakan.  $f$  berarti jumlah kalimat positif. Simbol  $u$  berarti jumlah kalimat negatif. Simbol  $r$  berarti jumlah kalimat-kalimat negatif, positif dan netral yang berkaitan objek penyikapan yang. Sedang simbol  $t$  berarti jumlah seluruh kalimat baik yang terkait maupun yang tidak terkait dengan obyek penyikapan. Selanjutnya, setiap unit kalimat positif memperoleh nilai +1. Sedangkan unit kalimat negatif mendapatkan nilai - 1, unit

kalimat netral dan tidak terkait dengan objek penyikapan memperoleh nilai 0. Teknik menerapkan rumus ini adalah dengan cara menghitung jumlah kalimat yang positif dan negatif yang menyangkut objek penyikapan tertentu. Kalau jumlah kalimat positif lebih banyak daripada yang negatif, rumus nomor 1 digunakan. Sebaliknya, jika jumlah kalimat negatif melebihi jumlah kalimat positif, rumus nomor 2 digunakan. Koefisien Keberpihakan berada pada rentang nilai +1 dan - 1.

Agar rumus ini dapat diterapkan dapat diterapkan, maka arah dan kecenderungan jumlah kalimat (negatif, positif, netral) terhadap objek penyikapan harus dihitung. Operasionalisasi ragam kalimat tersebut adalah sebagai berikut. (1) Kalimat dikategorikan negatif, kalau mengandung arti negatif terhadap, atau akan dimungkinkan menggiring para pembaca membentuk pendapat negatif terhadap suatu obyek tertentu. Kalimat negatif mengandung penjelasan negatif para pelaku dan perilaku dan mengutuk tindakan dan pelaku yang terlibat.(2) Kalimat disebut positif, kalau mengandung arti positif terhadap, atau akan dimungkinkan menggiring para pembaca membentuk pendapat positif terhadap suatu obyek tertentu. Kalimat ini akan mengandung penjelasan positif para pelaku atau perilaku dan menghargai tindakan dan pelaku yang terlibat. (3) Kalimat dikategorikan netral, kalau ia tidak menjelaskan obyek secara negatif atau positif. Juga yang tidak membenarkan atau

mengutuk. (4) Kalimat diklasifikasikan sebagai tidak terikat dengan obyek kajian, kalimat tersebut membahas topik di luar obyek kajian, termasuk di sini adalah kalimat transisi. Di samping itu, juga dihitung jumlah ragam kalimat klasifikasi Hayakawa seperti *report*, *inferences* dan *judgment*. Kerangka waktu penelitian untuk mengkaji pemberitaan koran *Jawa Pos* dan *Republika* adalah 19 Mei hingga 4 Juni 1999. Selama periode pemberitaan tersebut ditemukan beberapa hal sebagai berikut.

**Tabel 1**

Sebaran Dan Prosentase Jumlah Kalimat Negatif, Positif, Netral, Tidak Terkait Serta Koefisien Keberpihakan *Coeficients Of Imbalances* Terhadap Objek Penyikapan Golkar dan PDI-Perjuangan di Harian *Jawa Pos*

Arah Kalimat	Surat Kabar <i>Jawa Pos</i>			
	Obyek Penyikapan Thd. PDI-P		Obyek Penyikapan Thd. Golkar	
	Kalimat	%	Kalimat	%
Positif	128	30,1	225	24,3
Negatif	122	28,7	314	33,9
Netral	142	33,4	340	36,7
Tidak Terkait	32	7,5	46	4,9
Total	424	100	925	100
<b>Col</b>	<b>0,0046</b>		<b>-0,034</b>	

**Tabel 2**  
**Sebaran Dan Prosentase Jumlah Kalimat Negatif, Positif, Netral, Tidak Terkait Serta Koefisien**  
**Keberpihakan *Coeficients Of Imbalances* Terhadap Objek Penyikapan Golkar Dan PDI-**  
**Perjuangan**  
**Di Harian *Republika***

Arah Kalimat	Surat Kabar <i>Republika</i>			
	Obyek Penyikapan Thd PDI-P		Obyek Penyikapan Thd Golkar	
	Kalimat	%	Kalimat	%
Positif	23	5,1	106	51,2
Negatif	255	57,1	30	14,4
Netral	168	37,6	56	27
Tidak Terkait	45	10	35	16,9
Total	446	100	207	100
<b>Col</b>	<b>-0,029</b>		<b>0,226</b>	

Dua tabel di atas menunjukkan bahwa *Jawa Pos* telah bias dalam meliput Partai Golkar dengan memberikan gambaran yang negatif dengan nilai  $-0,034$  dan memberitakan PDI-P secara positif dengan nilai  $0,0046$  dalam koefisien keberpihakan (tabel 1). Perlakuan diskriminatif terhadap Golkar yang dilakukan *Jawa Pos* mungkin disebabkan *euphoria* kebebasan yang sedang dinikmati sebagian warga masyarakat termasuk pers. Perilaku yang menonjol pada era reformasi tersebut adalah menanggalkan semua tata aturan yang telah diletakkan Orde Baru dan merubahnya dengan yang baru sama sekali. Di samping itu, hujatan terhadap rezim Orde Baru mewarnai sikap dan tindakan masyarakat yang diwujudkan dengan menganggap Golkar adalah sisa-sisa rezim Orde Baru dan sangat *pro status quo*. Makanya, ia harus dihabisi hingga akar-akarnya. Sebaliknya, *Jawa Pos* menganggap PDI-P sebagai kekuatan reformasi yang *pro rakyat* yang harus didukung untuk menghadapi kekuatan *status quo*.

Berbeda dengan *Jawa Pos*, *Republika* memberikan Golkar secara positif dengan nilai  $0,226$  dan memperlakukan PDI-P secara negatif dengan nilai  $-0,029$  dalam koefisien keberpihakan (tabel 2). *Republika* berbuat demikian sebab ia adalah penerbitan yang berafiliasi kepada umat Islam yang makanya harus memihak dan memperjuangkan kepentingan pembaca muslim. Di samping itu, *Republika* juga berada dalam Yayasan Abdi Bangsa yang diketuai Presiden Habibie. Tidak heran, kalau *Republika* bersikap sangat 'bersahabat karib' dengan Golkar. Sebaliknya, *Republika* bersikap ofensif terhadap PDI-P dengan mengangkat isu-isu agama. Dari sektarian yang dikembangkan ini diharapkan akan mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat. Ini bisa dilihat dari maraknya iklan layanan masyarakat yang dimuat di kedua surat kabar yang bermaksud menghimbau warga muslim agar memilih partai yang calegnya memeluk agama yang sama dengan mereka.

**Tabel 3**  
**Distribusi dan Prosentase *Inferences*,**  
***Judgement***  
**Terhadap Kedua Objek Penyikapan PDI-P**  
**& Golkar**  
**DiHarian *Jawa Pos* & *Republika***

Surat Kabar	Jawa Pos		Republika	
	Kalimat	%	Kalimat	%
<i>Inferences</i>	27	2	15	2,2
<i>Judgement</i>	10	0,1	11	1,6
Total Semua Kalimat Yang Dikaji	1349	100	653	100

Meski terjadi pemihakan dari masing-masing surat kabar, *Republika* dan *Jawa Pos* (tabel 3) jarang dan sedikit sekali memperkuat bias mereka dengan menggunakan kalimat-kalimat subjektif *inferences* dan *judgement* dalam pemberitaan mereka. *Republika* hanya menggunakan 2,2% kalimat *inferences* dan 1,6% kalimat *judgement* dari total keseluruhan kalimat yang diteliti sebanyak 653 kalimat. Sementara *Jawa Pos* menggunakan 2% kalimat *inferences* dan 0,1% kalimat *judgement* dari jumlah keseluruhan kalimat sebanyak 1349 kalimat. Ini berarti *Republika* dan *Jawa Pos* masih bersikap objektif dalam meliput pemberitaan tentang Golkar dan PDI-P. Ini karena kedua koran tersebut lebih banyak mengandalkan kalimat *report*.

Temuan tersebut menunjukkan sikap partisan yang ditunjukkan kedua surat kabar memang jauh dari fungsi ideal pers nasional sebagaimana diamanatkan UU No 40 Tentang Pers. Pers yang seharusnya berperan sebagai mesin penggerak bahkan percepatan proses demokratisasi tidak mampu berfungsi maksimal. Kedua pers yang diteliti lebih asyik bermain dengan *hidden agenda* mereka sendiri dan tidak peduli terhadap proyek pemberdayaan politik rakyat serta

mengabaikan proyek memperjuangkan kepentingan rakyat seperti yang digambarkan oleh Bill Kovach yang mengharuskan pers melakukan sembilan kewajiban: berpegang teguh kepada kebenaran, mengutamakan kepentingan masyarakat, bersikap independen terhadap sumber berita, menjadi sarana mengawasi perilaku penguasa, menyediakan forum publik untuk kritik dan dukungan warga serta memperbolehkan wartawan untuk menggunakan hati nurani dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik.

### Penutup

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal di bawah ini:

1. Rumus koefisien keberpihakan yang dikembangkan oleh Janis dan Fader merupakan formula analisis isi kuantitatif yang dapat digunakan untuk menakar kadar objektivitas liputan pemberitaan media cetak.
2. Rumus ini dapat diterapkan dengan terlebih dahulu menentukan objek penyikapan yang hendak dikaji (*attitude object*). Kemudian ruang lingkup waktu pemberitaan berkaitan dengan objek penyikapan tersebut. Lantas, menghitung jumlah kecenderungan kalimat baik negatif, positif, netral, dan tidak terkait tentang objek penyikapan yang telah ditentukan.
3. Kalau jumlah kalimat positif lebih banyak daripada yang negatif, rumus nomor 1 digunakan. Sebaliknya, jika jumlah kalimat negatif melebihi jumlah kalimat positif, rumus nomor 2 diterapkan.
4. Agar dapat diketahui kadar objektivitas pemberitaan, tiga kategori kalimat yang dikembangkan Hayakawa juga dapat digunakan dengan cara menghitung jumlah kalimat yang mengandung aspek *report*, *inferences*, dan *judgement*. Kadar objektivitas sebuah liputan dianggap tinggi, ketika

jumlah kalimat yang mengandung *report* melebihi jumlah kalimat yang berisikan *inferences* dan *judgement*. Sebaliknya, kadar objektivitasnya dianggap rendah, ketika jumlah kalimat *inferences* dan *judgement* lebih banyak daripada jumlah kalimat *report*.

### Daftar Pustaka

- Denis, Everette E, (1991), *Understanding Mass Media*, Boston, Houghton Milfin Company
- Eriyanto, (2000), *Objektivitas Media: Pandangan Konstruksionis dan Positivistik*. Dalam Jurnal Pantau Edisi 08 / Maret-April 2000.
- Eriyanto, 2002, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, Lkis, Yogyakarta
- Eriyanto, 2011, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta
- Flournoy, Michael Don, (1989), *Analisa Isi Surat Kabar-Surat Kabar Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Hamad, Ibnu, (2004), *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis*, Granit, Jakarta.
- Hanifa, Siti, 2014, *Objektivitas Berita Pemilu Presiden RI 2014, Analisis Isi Atas Objektivitas Berita Pemilu Presiden RI dalam Berita Online Tempo.co.id dengan Detik.com*, skripsi Fikom Universitas Islam Bandung, diakses pada <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/Jurnalistik/article/download/118/26>.
- Hasibuan, Imron (editor), 1999, *Bersikap Independen! Pedoman Meliput Pemilu di Masa Transisi Demokrasi*”, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerjasama dengan IRRI Pact, Jakarta
- Hayakawa, Samuel, I, (1946), *Language in Action and Thought*, NY; Harcourt, Brace and World
- Janis, I. L., & Fadner, R. 1965. *The Coefficient of Imbalance*. In H. Lasswell, N. Leites, & Associates (Eds.), *Language of politics*: 153–169. Cambridge, MA: MIT Press.
- Kovach, Bill & Rosienstiel, Tom, (2004), *Sembilan Elemen Jurnalisme: Apa Yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan Yang Diharapkan Publik*, Yayasan Pantau, Institut Studi Arus Informasi, dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Jakarta
- Kaisiepo, Manuel, 1999, dalam Imron Hasibuan (editor), 1999, *Bersikap Independen! Pedoman Meliput Pemilu di Masa Transisi Demokrasi*, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerjasama dengan IRRI Pact, Jakarta
- Krippendorff, Klaus, (1993), *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- McQuail, Dennis, (2000), *Mass Communication Theories*, Sage, London
- McNair, Brian, 1999, *An Introduction to Political Communication*, Routledge, New York.
- Merrill, John, C, (1965), *How Stereotyped Three US. President*, *Journalism Quarterly*, 42;563-570
- Nimmo, Dan, (1993), *Komunikasi Politik; Komunikator, Pesan, dan Media*, Remaja Rosda Karya, Bandung

Peh, Diana & Melkote, Srinivas S, (1991), *Bias in Newspaper Reporting: A Content Analysis of the Coverage of Korean Airlines and Iran Airbus Shooting in The U.S Elite Press*, International Communication Gazette, Vol 47 No. 2, (January 1991)

Rahmat, Jalaluddin, (1989), *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung, Remaja Karya

Severin, Werner J, & Tankard, James, W, (1992), *Communication Theories: Origins, Methods, and Uses in the Mass Media*, New York, Longman

Strekfuss, Richard, (1990), *Objectivity in Journalism: A Search and Assessment*, Journalism Quarterly; 67: 973-975

Syafiya & Yahya, (1990), *Australian Perception of Indonesia: Content Analysis of The Australian Newspapers' News Coverage on East Timor Affairs*, Laporan Penelitian di IAIN Malang yang tidak dipublikasikan

Suwardi, Harsono. 1993, *Peran Pers Dalam Politik di Indonesia; Suatu Studi Komunikasi Politik Terhadap Liputan Berita Kampanye Pemilu 1987*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Subiakto, Henri, Cahyana, Yan Yan, et.al . 2000, *Obyektifitas Pemberitaan Pers Indonesia*, diakses pada <http://www.journal.unair.ac.id/login/jurnal/filer/J.%20Penelit.Din.%20Sos.1-3%20Des%202000%20%5B06%5D.pdf>

Wimmer, Roger, D & Dominick, Joseph, R., 2003, *Mass Media Research. An Introduction*, Thomson Wadsworth, Belmont California, United States.